

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali Wisnubroto. 2002. *Praktek Peradilan Pidana (Proses Persidangan Perkara Pidana)*. Jakarta: Galaxy Puspa Mega.
- Ana Nadia Abrar. 2005. *Terampil Menulis Proposal Penelitian Komunikasi*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Bahder Johan Nasution. 2008. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Barda Nawawi Arief. 2010. *Strategi Penanggulangan Kejahatan Telematika*. Semarang: Universitas Atma Jaya.
- 2010. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- 2011. *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- 2010. *Kebijakan Hukum Pidana dan Perkembangannya Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: PT Kencana.
- 2001. *Masalah Penegakan Hukum–Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Dominikus Rato. 2010. *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Effendy, Marwan. 2023. *Tipologi Kejahatan Perbankan Dari Perspektif Hukum Pidana*. Jakarta: Sumber Ilmu Jaya.
- Estiyarso, t.t. 2005. *Penyempurnaan Penyidikan Dalam Rangka Penuntutan*. Jakarta: Kejaksaan Agung RI.
- Hj. Mien Rukmini. 2009. *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi (Sebuah Bunga Rampai)*. Bandung: Alumni.
- Ishaq. 2009. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kristian dan Yopi Gunawan. 2013. *Tindak Pidana Perbankan*. Bandung: Nuansa Aulia.
- .
-----, 2005. *KUHAP dan KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Lilik Mulyadi. 2002. *Hukum Acara Pidana (Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Suatu Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan)*. Denpasar: PT. Citra Aditya Bakti.
- Leden Marpaung. 2012. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Yahya Harahap. 2006. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marfei Halim. 2002. *Mengurai Benang Kusut*, Bank Indonesia. Jakarta: Rajawali Press.
- Marwan Effendy. 2012. *Tipologi Kejahatan Perbankan dari Perspektif Hukum Pidana*. Jakarta: Referensi, Ciputat Jakarta Selatan.
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Muladi. 1995. *Kapita Selekta System Peradilan Pidana*. Semarang: B.P Undip.
- Mulyana W. Kusumah. 2000. *Persepsi, Teori Dan Kebijakan Hukum*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Neni Sri Imaniyati. 2010. *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: Rafika Aditama.
- Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: PT.Bina Ilmu.
- Romli Atmasasmita. 2011 *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Satjipto Rahardjo. 2012. *Ilmu Hukum*, Editor Awaludin Marwan. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Sidharta Arief. 2007. *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Sidik Sunaryo. 2004. *Sistem Peradilan Pidana*. Malang: Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang.
- Siswanto Sunarso. 2005. *Hukum Pidana Lingkungan Hidup Dan Strategi Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Soerjono Soekanto. 2001. *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*. Jakarta: CV. Rajawali Pers.
- Sudarwan Danim. 2002. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia.
- Sudikno Mertokusumo. 1993. *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*. Yogyakarta: PT. Citra Aditya Bhakti.
- Sudikno Mertokusumo. 2007. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. 2006. *Kriminologi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

B. Disertasi/Jurnal

- Achmad Abdullah Farchan dan Gemala Dewi, “Kajian Yuridis Tindak Pidana Terhadap Perhimpunan Dana Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Perbankan Dan Perbankan Syariah”, *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, Vol. 3, No. 2, December 2019, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2019.
- Amad Sudiro, “Ruang Lingkup Tindak Pidana Ekonomi di Bidang Perbankan”, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* Vol 3, No 3 (1996), Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara, 1996.
- Astrid Jansye Lestari, “Kajian Yuridis Tindak Pidana Perbankan Terhadap Perhimpunan Dana Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998”, *Jurnal Lex Crimen* Vol. VII/No. 3 /Mei/2018, Fakultas Hukum Universitas Ratulangi, 2016.
- Devi Anggraeni and Wisnu Budhi Pratomo, “Dampak Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) Terhadap Kelangsungan Sektor Jasa Keuangan Khususnya Sektor Lembaga Pembiayaan” 5, no. 12 (2023).
- Farida Sekti Pahlevi, “Pemberantasan Korupsi Di Indonesia: Perspektif Legal System Lawrence M. Freidman”, *Jurnal El-Dusturie*, Vol.1, No.1, Juni 2022, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2022.
- Ifrani, “Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa,” *Al-Adl: Jurnal Hukum* 9, no. 3 (January 30, 2017): 319–36, <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/aldli/article/view/1047>.

- M. Arief Amrullah, "Politik Hukum Pidana Dalam Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan", *Jurnal Hukum Fak. Hukum UII* No. 21 Volume 9: Jogjakarta, 2002.
- M. Zen Abdullah, "Upaya Penanggulangan Tindak Pidana di Bidang Perbankan Melalui Pendekatan Kebijakan Regulasi", *Jurnal Legalitas* Edisi Juni 2019 Volume XI Nomor 1.
- Linda Hindriana, Neni Sri Imaniyati, "Penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Dalam Menangani Kejahatan Perbankan", *Jurnal Aktualita*, Vol. 3 No. 1 2020 hlm. 303-318, Magister Program Studi Kenotariatan Pascasarjana Universitas Islam Bandung, 2020.
- M. Irsan Nasution, "Pola Pertanggungjawaban Pidana Bank Kaitannya Dengan Tindak Pidana Perbankan", *Jurnal Adliya*, Vol. 9 No. 1, Edisi: Januari-Juni 2015 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2015.
- Maikel Pieter Bukara, "Pemberantasan Tindak Pidana Perbankan Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998", *Jurnal Lex Crimen* Vol. V/No. 7/Sep/2016, Fakultas Hukum Universitas Ratulangi, 2016.
- Toetik Rahayuningsih, "Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Perbankan Dalam Rangka Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang", *Jurnal Rechtidee* Vol 8, No 2 (2013) Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura, 2013.
- Moh. Mahfud MD, Penegakan Hukum Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bahan pada Acara Seminar Nasional "Saatnya Hati Nurani Bicara" yang diselenggarakan oleh DPP Partai HANURA. Mahkamah Konstitusi Jakarta, 8 Januari 2009.
- Mukhlis R, "Pergeseran Kedudukan Dan Tugas Penyidik Polri Dengan Perkembangan Delik-Delik Diluar KUHP", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.III, No.1, 2010.
- Muhammad Urfi A., "Urgensi Pembentukan Undang-Undang Digital Banking bagi Perbankan Syariah di Indonesia", *Lex Renaissance*, Vol. 5, No. 4, 2020.
- Nunuk Sulisrudatin, "Analisa Kasus Cybercrime Bidang Perbankan Berupa Modus Pencurian Data Kartu Kredit", *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*—Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Volume 9 No. 1, September 2018.

Nur Agus Susanto, Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus “ST” Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012, *Jurnal Yudisial* Vol. 7 No. 3 Desember 2014.

Putri Ismu Rahayu Saputri, Ruslan Renggong, and Almusawwir Almusawwir, “Kewenangan Penyidikan Oleh Lembaga Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Tindak Pidana Perbankan Belum Optimal,” *Indonesian Journal of Legality of Law* 4, no. 1 (2021): 73–78, <https://doi.org/10.35965/ijlf.v4i1.625>.

Rowlando Christoper Kiriman, “Berlakunya Ketentuan Pidana Terhadap Pihak-Pihak Yang Melakukan Kejahatan Dalam Melaksanakan Kegiatan di Bidang Perbankan”, *Lex Crimen* Vol. X/No. 4/Apr/EK/2021.

Supaijo, *Penegakan Hukum Pidana Dalam Kejahatan Perbankan, Artikel Ilmiah E Journal IAIN Raden Intan*, Januari 2010.

Sri Wulandari, “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana di Bidang Perbankan”, *Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat*, Volume 19, No. 2, Oktober 2021.

Syanette D. Katoppo, “Kajian Hukum Tentang Penanganan Penyidikan Polri Terhadap Kejahatan Perbankan”, *Jurnal Lex Administratum*, Vol. III/No.3/Mei/2015.

Sahuri Lasmadi dalam *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana*, Disertasi Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2003.

Violita Citra Kusuma Dewi, Ali Muhammad, and Cahyoko Edi Tando, “Koordinasi Antara Institusi Penegak Hukum Dalam Hal Menangani Masalah Penahanan Berdasarkan KUHAP Sebagai Upaya Mewujudkan Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Indonesia,” *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* 4 (2022): 1349–58.

C. Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

----- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

-----*Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. UU Nomor 1 Tahun 2023.

-----*Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan*. UU Nomor 21 Tahun 2011.

-----*Undang-Undang tentang Perbankan*. UU Nomor 10 Tahun 1998.

-----Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia. UU Nomor 3 Tahun 2004.

-----*Undang-Undang tentang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*. UU Nomor 2 Tahun 2002.

-----Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 /POJK.01/2015 Tentang Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan.

D. Internet

Bank Mayapada langgar batas penyaluran kredit, ini penjelasan OJK. Melalui <https://finansial.bisnis.com/read/20200713/90/1265472/bank-mayapada-langgar-batas-penyaluran-kredit-ini-penjelasan-ojk> pada tanggal 12 Mei 2024.

BPHN, “Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang *Otoritas Jasa Keuangan*”, diakses melalui <https://bphn.go.id/data/documents/11uu021.pdf>, tanggal akses 28 Mei 2024.

H.K Martono, *Pengertian Perspektif atau sudut pandang*, diakses melalui <https://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-perspektif-atau-sudut-pandang>, tanggal akses 23 Mei 2024.

<http://yancearizona.net/2008/04/13/apa-itu-kepastian-hukum/> Diakses pada tanggal 03 Oktober 2023, Pukul 21:30 WIB.

<https://ngobrolinhukum.wordpress.com/memahami-kepastian-dalam-hukum/> Diakses pada tanggal 2 Oktober 2023, Pukul 09:50 WIB.

H. Hendri, “Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Jasa Keuangan,” 2022, http://eprints.uniska-bjm.ac.id/10872/%0Ahttp://eprints.uniskabjm.ac.id/10872/1/ARTIKEL_Hendri.pdf.

Jimly Ashidique, “*Penegakan Hukum*”, diakses melalui <http://solusihukum.com>. tanggal akses 15 Februari 2024.

Kasus kredit fiktif Rp2,2 miliar di Bogor, BRI berkoordinasi dengan Penegak Hukum dan Jatuhkan sanksi. Melalui <https://bisnis.tempo.co/read/>

1619597/kasus-kredit-fiktif-rp-22-miliar-di-bogor-bri-berkoordinasi-dengan-penegak-hukum-dan-jatuhkan-sanksi pada tanggal 12 Mei 2024.

Kejari Brebes Tahan Tiga Tersangka Kasus Kredit Fiktif Bank BUMN. Melalui <https://panturanews.com/index.php/panturanews/baca/259202/02/11/2022/kejari-brebes-tahan-tiga-tersangka-kasus-kredit-fiktif-bank-bumn> pada tanggal 12 Mei 2024.

Kejaksanaan menahan mantan pegawai bank Sultra gelapkan dana Rp1,9 miliar. Melalui <https://sultra.antaranews.com/berita/428073/kejaksanaan-menahan-mantan-pegawai-bank-sultra-gelapkan-dana-rp19-miliar>, pada tanggal 12 Mei 2024.

Otoritas Jasa Keuangan, diakses melalui <https://siprojek.ojk.go.id/home/contactus>, tanggal akses 25 Mei 2024.

Ojk.go.id, “Siaran Pers: OJK Terbitkan Aturan Baru Mengenai Penyidikan Tindak Pidana Sektor Jasa Keuangan,” Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK, 2023, <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/OJK-Terbitkan-Aturan-Baru-Mengenai-Penyidikan-Tindak-PidanaSektor-Jasa-Kuangan.aspx>.

Rugikan Negara Rp29 Miliar, 5 Terdakwa Kasus PD BPR Bank Salatiga Akhirnya Dapat Hukuman Setimpal. Melalui <https://jateng.tribunnews.com/2022/02/16/rugikan-negara-rp-29-miliar-5-terkdawa-kasus-pd-bpr-bank-salatiga-akhirnya-dapat-hukum-setimpal?page=2>, pada tanggal 12 Mei 2024.

Maulana Deddy Alamsyah, “Jenis Kejahatan Perbankan”, diakses melalui <http://carapedia.com/jenis-kejahatan-perbankan-mengancam-nasabah-info-4299.html>, tanggal 23 Maret 2024.

Tersangka kasus kredit fiktif Bank Jogja Cuci Uang untuk beli apartemen hingga barang antik. Melalui <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2022/09/28/5101113176/tersangka-kasus-kredit-fiktif-bank-jogja-cuci-uang-untuk-beli-apartemen-hingga-barang-antik> pada tanggal 12 Mei 2024.

Yunus Husein, “Batalkah Otoritas Jasa Keuangan Sebagai Penyidik Tunggal?,” Kompas.id, 2023, <https://www.kompas.id/baca/opini/2023/02/12/batalkah-otoritas-jasa-keuangan-sebagai-penyidik-tunggal>.